MONEY POLITICS DAN RESPON GENERASI MILENIAL (STUDI KASUS: FENOMENA PILPRES TAHUN 2024 DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN)

Disusun Oleh :

BUDI KURNIAWAN
NPM: 222070286
PROGRAM STUDI: ILMU POLITIK

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana (S.IP)
Program Studi Ilmu Politik

SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA
TAHUN 2026

MONEY POLITICS DAN RESPON GENERASI MILENIAL (STUDI KASUS: FENOMENA PILPRES TAHUN 2024 DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN)

BUDI KURNIAWAN
222070286

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana (S.IP)
Program Studi Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik

Diperiksa dan disetujui oleh :

Dr. Wahyudi Pramono, M.Si	Arlis Prayugo, S.IP., M.Pd
Dosen Pembimbing	Ketua Program Studi
Tanggal :	Tanggal :

Mengetahui,
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
Ketua,

Dr. Sumarsono, MDM
Tanggal :

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Kurniawan

NPM : 222070286

Program Studi : S1 Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan skripsi ini apabila benar terbukti melakukan Tindakan plagiat (penjiplakan)

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta 16 Januari 2026

Budi Kurniawan

222070286

ABSTRAK

"*MONEY POLITICS* DAN RESPON GENERASI MILENIAL (STUDI KASUS: FENOMENA PILPRES TAHUN 2024 DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN)".

Oleh :

Budi Kurniawan

NPM 222070286

Pembimbing:

Dr. Wahyudi Pramono, M.Si

Penelitian ini menganalisis fenomena politik uang (*money politics*) dan respon partisipasi politik generasi milenial pada Pilpres 2024 di Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi tingkat partisipasi milenial, mengidentifikasi pola praktik politik uang, serta dampaknya terhadap keputusan politik mereka. Menggunakan metode kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi milenial secara kuantitas tergolong tinggi namun terfragmentasi secara kualitas antara idealisme dan pragmatisme ekonomi. Praktik politik uang telah bertransformasi dari cara konvensional ke instrumen digital dan manipulasi program bantuan sosial melalui jaringan perantara lokal. Respon milenial terbagi dalam empat pola: pragmatis (menerima karena kebutuhan), strategis (menerima namun tetap memilih sesuai hati nurani), idealis (menolak keras), dan apatis/golput (menarik diri sebagai bentuk protes). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi memerlukan sinergi antara literasi politik, kemandirian ekonomi generasi muda, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Kata Kunci: Money Politics, Partisipasi Politik, Generasi Milenial, Pilpres

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"*Money politics* Dan Respon Generasi Milenial (Studi Kasus: Fenomena Pilpres Tahun 2024 Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan)".**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN). Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk memotret realitas demokrasi di tingkat lokal, khususnya mengenai bagaimana pemilih muda bersikap di tengah kepungan praktik politik transaksional.

Dalam perjalanan panjang penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan moral maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Politik Abdi Negara (STIP-AN), Bapak Dr. Sumarsono, MDM. yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan skripsi ini dan terus berusaha untuk membuat STIP-AN lebih maju.
2. Bapak Arlis Prayugo, S.IP, M.Pd. selaku Kaprodi Ilmu Politik, STIP- AN yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Wahyudi Pramono, M.Si., Dosen pembimbing penulis selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Keluarga tercinta, Saudara-saudara saya , khususnya orang tua penulis yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.
5. Seluruh dosen dan staf akademik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama masa studi.
6. Seluruh teman-teman Angkatan IX kelas A1 yang menjadi semangat penulis untuk terus menyelesaikan perkuliahan ini sampai wisuda bersama.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu politik, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 16 Januari 2026

Penulis

Budi Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……..……..ii

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI……...……iii

ABSTRAK...……...……..iv

KATA PENGANTAR…….……....v

DAFTAR ISI……...……..vii

DAFTAR TABEL…….…….....xii

DAFTAR GAMBAR…….……....…xiii

DAFTAR LAMPIRAN……..…….xiv

BAB I PENDAHULUAN……..1

1.1. Latar Belakang Masalah…….……..1

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian…….……12

1.2.1. Fokus Penelitian……...…….12

1.2.2. Subfokus Penelitian……..…...…...12

1.3. Perumusan Masalah……...……13

1.4. Tujuan Penelitian…….……...……13

1.5. Kegunaan Penelitian…….……..14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……..……...……15

2.1. Kerangka Teoritis……...……15

2.1.1. Teori Politik……15

2.1.2. Teori Partisipasi Politik…….……..……...……18

2.1.3. Teori Perilaku Pemilih……20

2.1.4. Teori Money Politics……...……...23

2.1.5. Generasi Milenial dan Karakteristik Politiknya…...……...26
2.1.6. Pemilihan Umum di Indonesia…….……...31
2.1.7. Pemilihan Umum Presiden (PILPRES)……...34
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan……...……...37
2.3. Kerangka Pemikiran dan Operasional Konsep ….…..…….……..……39
2.3.1. Kerangka Pemikiran……...……40
2.3.2. Operasional Konsep……..….41
2.4. Hipotesis…….……...42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN…….……44

3.1. Desain Penelitian…….…..……..44
3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian…….……44
3.2.1. Lokasi Penelitian…….……...44
3.2.2. Jadwal Penelitian…….……...45
3.3. Latar/Setting Penelitian……...…….…….……..45
3.4. Teknik Pengumpulan Data…….……46
3.4.1. Teknik Observasi……46
3.4.2. Teknik Wawancara…….……48
3.4.3. Teknik Studi Dokumentasi…….…….……48
3.5. Teknik Analisis Data…….……..51
3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data ……52

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…….……...….56

4.1. Gambaran Umum Lokasi/Lokus…….…..……..56
4.1.1. Profil Administratif dan Geografis…….56
4.1.2. Kondisi Demografi dan Struktur Penduduk……...……57

4.1.3. Kondisi Sosial Ekonomi…….58

4.1.4. Konteks Politik Lokal……58

4.2. Hasil Penelitian……..…….……59

4.2.1. Partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.…….……...…... 59

4.2.1.1. Perspektif Akademis, Tipologi Partisipasi Milenial sebagai Gladiator Digital…….……59

4.2.1.2. Kualitas Partisipasi, Pandangan Anggota DPRD dan Otoritas Legislatif……...…....…….….60

4.2.1.3. Pengawasan Pemilu, Data Lapangan Kehadiran dan Kemandirian Pemilih……..61

4.2.1.4. Tipologi Motivasi Milenial, Antara Harapan Ekonomi dan Idealisme…….…….... 63

4.2.1.5. Peran Tokoh Masyarakat dan Agama dalam Mobilisasi Milenial…….……..67

4.2.1.6. Dampak Sosial-Ekonomi terhadap Partisipasi Politik…….…….68

4.2.2. Bentuk-bentuk dan pola *Money politics* yang terjadi dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan……70

4.2.3. Fenomena *Money politics* dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan…….……81

4.3. Pembahasan Temuan penelitian…….....……..92

4.3.1. Partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan…….……...93

4.3.2. Analisis Bentuk-bentuk dan Pola Money Politics, Infiltrasi Transaksional dalam Struktur Urban Kelurahan Petukangan Utara……..……96

4.3.3. Fenomena *Money politics* dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial, Rasionalitas Pragmatis dalam Bayang-bayang Krisis Integritas ……99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……..…….…….....112

5.1. Kesimpulan…….…..…….112

5.1.1. Interpretasi Dan Verifikasi Fenomena *Money politics* Serta Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial……112

5.1.2. Interpretasi Temuan Tingkat Partisipasi Politik Generasi Milenial: Verifikasi Teori Partisipasi dan Karakteristik Generasi ……...112

5.1.3. Verifikasi Temuan Bentuk Dan Pola Praktik Money Politics: Dari Konvensional Hingga Digitalisasi Transaksional…….116

5.1.4. Analisis Respon Dan Keputusan Politik Generasi Milenial, Verifikasi Teori Pilihan Rasional Dan Perilaku Pemilih……...119

5.1.5. Sintesis Teoretis, Dampak Terhadap Kualitas Demokrasi Dan Kepemimpinan Nasional…….….121

5.1.6. Kesimpulan Akhir, Jawaban Konkret Terhadap Rumusan Masalah……..……...….124

5.2. Saran…….…..…….126

5.2.1. Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)…….126

5.2.2. Pemerintah dan Lembaga Eksekutif……127

5.2.3. Masyarakat dan Generasi Milenial……..128

5.2.4. Parpol (Partai Politik) ……..129

5.2.5. Saran untuk Penelitian Selanjutnya…….132

DAFTAR PUSTAKA……..……...…133

LAMPIRAN……...……...…….……137

1. Pedoman Observasi …...……..……..……139
2. Pedoman Wawancara …....…….……....…141
3. Catatan Lapangan Hasil Observasi ……...……..150
4. Catatan Lapangan Hasil Wawancara (Transkrip) ……...…….153
5. Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen) ……...213
6. Dokumen Ijin Penelitian ……..…220

RIWAYAT HIDUP …….224

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Gambaran Kasus Politik Uang Berdasarkan Beberapa Sumber..... 4

Tabel 2. 1. Hasil penelitian yang relevan 37

Tabel 2. 2. Operasional Konsep..... 41

Tabel 3. 1. Rencana Jadwal Penelitian..... 45

Tabel 3. 2. Daftar Narasumber Usulan Penelitian 53

Tabel 4. 1. Aspek pengawasan dan implikasinya berdasarkan temuan …..……..62

Tabel 4. 2. Motivasi responden, status partisipasi dan sumber informasi…….…66

Tabel 4. 3. Matriks Bentuk Instrumen *Money politics* di Petukangan Utara...…..72

Tabel 4. 4. Pola Distribusi *Money politics* di Wilayah Urban Petukangan Utara.78

Tabel 4. 5. Perbandingan Respon Milenial Berdasarkan Latar Belakang……..88

Tabel 4. 6. Relevansi Konsep/Teori dari hasil temuan terhadap dimensi partisipasi politik……..94

Tabel 4. 7. Kategori, instrument dan pola distribusi sesuai teori pada Bab II……97

Tabel 4. 8. Karakteristik Responden/Narasumber……...….100

Tabel 4. 9. Atribut Strauss & Howe, Manifestasi & dampak Keputusan politik.105

Tabel Lampiran Pedoman Observasi……...…….138

Tabel Lampiran Catatan Lapangan Hasil Observasi……...…….150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi. 59

Lampiran 2 Pedoman Wawancara 61

Catatan Lapangan Hasil Observasi……..……..157

Catatan Lapangan Hasil Wawancara (Transkrip) ……..…….160

Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen)……...……222

Dokumen Ijin Penelitian.……...……...…226

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud nyata dari sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung menentukan arah kepemimpinan bangsa. Dalam konteks Indonesia, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah momen penting yang tidak hanya menentukan pemimpin negara, tetapi juga mencerminkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pemilu di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah praktik *Money politics* atau politik uang.

Bangsa Indonesia merupakan negara yang menganut kedaulatan kepada rakyat yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Elemen penting dalam demokrasi adalah pemilu yang menjadi salah satu indikator kualitas berjalannya demokrasi. Indonesia menyelenggarakan pemilu setiap lima tahun sekali. Demokrasi memiliki kaitan yang begitu erat dengan pemilu, namun pengkaitan pemilu dengan demokrasi tersebut hanya dapat dilakukan saat pemilu yang akan dilakukan dapat mencerminkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sebuah sirkulasi di dalam kekuasaan.[1] Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain.

[1] Sri H. Puspitasari, "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu," *Ius Quia Iustum Law Journal* 11, no. 25 (Januari 2004), hlm.135-148

Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam "sopan-santun politik".[2]

Politik uang merupakan bentuk manipulasi yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk memengaruhi pilihan pemilih dengan memberikan imbalan materi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini merupakan tantangan serius dalam menerapkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Realitas ini tidak hanya merusak etika politik, tetapi juga menciptakan iklim politik yang transaksional dan merugikan demokrasi. *Money politics* yang terjadi dalam berbagai jenjang pemilu dan hampir di semua daerah di Indonesia. Berbagai penelitian dan laporan media telah mengungkapkan adanya praktik *Money politics* di berbagai daerah, sehingga mempengaruhi proses demokrasi dan legitimasi pemilu. Salah satu kelompok pemilih yang sangat strategis dan berpotensi dalam menentukan arah demokrasi adalah generasi milenial, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Dalam pemilu 2024, generasi milenial dan generasi Z menyumbang hampir 60% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan jumlah yang besar tersebut, pandangan, sikap, dan partisipasi generasi milenial terhadap praktik *Money politics* menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Meskipun generasi

[2] Roem Topatimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang* (Jakarta: Maarif Institute, 2011), hlm 45.

milenial dikenal sebagai generasi yang lebih terbuka, kritis, dan melek teknologi, kenyataannya mereka tidak sepenuhnya imun terhadap pengaruh politik uang. Beberapa dari mereka memilih untuk tetap berpartisipasi dengan menerima imbalan, sementara yang lain justru merasa kecewa dan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap korup. Rangkuman dari laporan media dan akademis mengenai kasus-kasus politik uang di Indonesia:

- Pilkada dan Pileg: Studi dari berbagai sumber, termasuk jurnal dan laporan lembaga seperti ICW, menunjukkan bahwa praktik politik uang marak terjadi baik pada pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Contohnya, dalam laporan ICW, ditemukan 313 kasus politik uang pada Pileg 2014, dengan Banten menjadi provinsi dengan pelanggaran terbanyak.
- Bentuk Praktik: Bentuk *Money politics* sangat beragam, tidak hanya sebatas pemberian uang, tetapi juga barang (sembako), serta janji-janji proyek pembangunan infrastruktur atau subsidi. Praktik ini sering dilakukan menjelang hari H pemilu, yang dikenal dengan istilah “serangan fajar.”
- Target dan Dampak: Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah seringkali menjadi target utama. Namun, praktik ini juga menyasar pelajar dan pemilih muda. Laporan dari ICW menyebutkan bahwa banyak pelajar di Banten mengaku menerima amplop berisi uang dengan jumlah bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu menjadi penghalang bagi praktik politik uang. Laporan lain dari Universitas Andalas mencatat

bahwa 35% responden di Pemilu 2024 mengakui bahwa uang memengaruhi pilihan mereka.

- Respon Lembaga: Lembaga seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berupaya menindak dan mencegah praktik ini. KPK bahkan meluncurkan kampanye "Hajar Serangan Fajar" menjelang Pemilu 2024 sebagai respon terhadap tingginya praktik politik uang. Namun, penegakan hukum dan sanksi masih menjadi tantangan.

Laporan & Temuan Terkait Pilpres 2024

- Pengaruh terhadap Pemilih: Laporan dari Universitas Andalas mencatat bahwa 35% responden di Pemilu 2024 mengakui bahwa uang memengaruhi pilihan mereka. Hal ini menunjukkan dampak signifikan dari praktik politik uang terhadap preferensi pemilih.
- Target Utama: Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah seringkali menjadi sasaran empuk. Namun, laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menemukan bahwa praktik ini menyasar pelajar dan pemilih muda. Beberapa pelajar di Banten bahkan mengaku menerima amplop berisi uang dengan jumlah bervariasi.

Tabel 1.1. Gambaran Kasus Politik Uang Berdasarkan Beberapa Sumber

Pemilihan Umum	**Temuan Kasus**	**Lembaga Pengawas Pemilu/Survei**
Pemilu Legislatif 2014	313 kasus politik uang yang ditemukan dalam Pemilu Legislatif 2014. Angka ini disebutkan naik dua kali lipat dibandingkan Pemilu Legislatif 2009.	Indonesia Corruption Watch (ICW)

Pilkada 2018	Bawaslu memproses 35 kasus dugaan politik uang dalam Pilkada 2018, dengan kasus terbanyak di Sulawesi Selatan.	Bawaslu
Pemilu Serentak 2019	Bawaslu mencatat adanya 6.649 temuan pelanggaran pemilu secara keseluruhan, di mana 548 di antaranya merupakan pelanggaran pidana dan 107 pelanggaran kode etik. Dari pelanggaran pidana tersebut, politik uang disebut sebagai pelanggaran tertinggi. Laporan dari berbagai lembaga survei, termasuk yang dikutip dalam jurnal-jurnal ilmiah, menyebutkan bahwa tingkat keterpaparan *Money politics* berkisar antara 19,4% hingga 33,1% dari pemilih.	Bawaslu dan Indikator Politik Indonesia
Pemilu Serentak 2024	Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa 35% responden di Pemilu 2024 menyatakan bahwa pilihan mereka ditentukan oleh pemberian uang.	Indikator Politik Indonesia

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

Aspek lainnya yang paling penting dalam negara demokrasi yaitu adanya partisipasi politik. Jalannya pemerintahan sangat dipengaruhi oleh adanya sebuah partisipasi politik, partisipasi politik merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam demokrasi (*cornerstone of democracy*), akan tetapi adanya patisipasi masyarakat secaralangsung di dalam proses politik masih memiliki ambivalensi.[3] Peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi dalam partisipasi politik, adalah Pilpres.

[3] Tia Subekti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)," 2014, https://www.neliti.com/publications/108550/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-umum-studi-turn-of-voter-dalam-pe.

Beberapa alasan mengapa partisipasi politik, khususnya dalam pemilu, sangat penting adalah terciptanya pemerintahan yang sah, dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan cara utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara. Partisipasi politik memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung sah dan demokratis, dengan pemimpin yang terpilih berasal dari kehendak rakyat. Partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu pilar utama dari demokrasi. Ketika rakyat berpartisipasi secara aktif dalam memilih pemimpin, mereka turut memastikan bahwa sistem politik tetap terbuka, akuntabel, dan representatif. Ini membantu menjaga kepercayaan terhadap institusi negara dan mencegah otoritarianisme. Partisipasi politik masyarakat pada saat ini tidak dapat terlepas dari kondisi dan sistem politik yang sedang berjalan di negara tersebut. Hingga saat ini sistem politik di indonesia telah berulang-kali mengalami perubahan, yang dimulai dari pasca kemerdekaan hingga saat ini.

Banyak masyarakat yang beranggapan mengenai reformasi yang dirasakan sebagai masa yang lebih demokratis. Pemilu menjadi bagian dari penataan struktur kekuasaan negara dalam wujudnya menciptakan mekanisme kontrol dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemilu merupakan salah satu komponen terpenting dalam masyarakat demokratis. Menurut Sobolim, Perilaku Politik (*Politic Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik.[4]

[4] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010).

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.[5] Dengan berpartisipasi dalam pemilu, warga negara tidak hanya menjalankan hak pilih mereka, tetapi juga dapat mengungkapkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap arah negara. Partisipasi ini memberi suara pada isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, dari ekonomi hingga kebijakan sosial. Partisipasi dalam pemilu juga berperan dalam mencegah ketegangan sosial dan politik. Ketika warga negara merasa bahwa mereka memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih puas dengan hasil pemilu, mengurangi potensi protes atau konflik.

Partisipasi dalam pemilu adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dalam masyarakat demokratis. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih, yang merupakan ekspresi dari kebebasan individu dalam menentukan nasib bangsa. Ketika masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu, kandidat dan partai politik akan lebih mendengarkan dan merespon kebutuhan serta harapan rakyat. Ini mengarah pada

[5] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, IX (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

proses politik yang lebih terbuka, dengan kandidat yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, partisipasi Pilpres adalah bagian integral dari kehidupan demokrasi yang memastikan bahwa negara dikelola oleh pemimpin yang dipilih secara bebas dan adil oleh rakyat. Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk aktif berpartisipasi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang menjadi sarana bagi rakyat untuk secara langsung menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan wakil-wakil rakyat maupun kepala negara. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu menjadi indikator penting dari berjalannya proses demokratisasi di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik masyarakat terus menjadi perhatian, terutama dalam melihat keterlibatan kelompok-kelompok tertentu, salah satunya adalah pemilih pemula.

Generasi milenial, yang umumnya merujuk pada mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996[6], memiliki sejumlah karakteristik tertentu dalam berpolitik yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Beberapa karakteristik tersebut meliputi: Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial: Milenial sangat terhubung dengan teknologi dan media sosial. Mereka cenderung lebih mudah mendapatkan informasi politik melalui platform digital, seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube, serta terlibat dalam diskusi politik secara online.

[6] Pew Research Center, "Generations Defined," diakses 20 april 2025, https://www.pewresearch.org/topic/generations-and-age/

Media sosial juga memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan pendapat, berdiskusi, dan mengorganisir aksi-aksi politik. Anak muda generasi milenial di pemilu kali ini terlihat memiliki pandangan yang lebih luas, sikap yang antusias, dan ketertarikan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Namun, apakah tingginya antusiasme dan ketertarikan tersebut berarti para anak muda benar-benar aware dengan pentingnya politik, pemilu, para calon, serta visi dan misi mereka?

Kesadaran politik didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengetahui tentang hal-hal, institusi, dan gagasan penting yang berhubungan dengan sistem politik.[7] Generasi muda dengan perkembangan teknologi terkenal adaptif dengan perkembangan-perkembangan tersebut dapat dinyatakan sebagai pelopor perubahan. Salah satu perubahan paling menonjol yang dapat dikaji pada pemilu kali ini adalah cara berkampanye untuk menarik suara generasi muda melalui media sosial.

Begitu pula dalam keterlibatan dalam Gerakan Sosial Milenial lebih cenderung terlibat dalam gerakan sosial atau protes yang berfokus pada isu-isu keadilan sosial, lingkungan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Mereka lebih mendukung perubahan sosial yang mencakup aspek keberagaman, inklusivitas, dan hak-hak minoritas. Banyak milenial yang merasa skeptis terhadap partai politik tradisional dan institusi pemerintah. Mereka lebih tertarik pada politik berbasis isu daripada politik yang terikat pada ideologi atau partai tertentu. Sikap

[7] Verba, Sidney, and Norman H. Nie. *Participation in America: Political Equality and the Poeple*. New York: Harper & Row, 1972, hlm. 201-205.

ini membuat mereka lebih memilih untuk mendukung kandidat atau gerakan yang dianggap autentik dan pro-rakyat, meski tidak selalu berasal dari kalangan politik mainstream.

Generasi milenial lebih mengutamakan fleksibilitas, keterbukaan, dan pendekatan praktis untuk menyelesaikan isu-isu politik dan sosial. Media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan memengaruhi pendapat masyarakat dimanfaatkan oleh para politikus sebagai media kampanye. Selain biaya operasional yang lebih rendah, kampanye melalui media sosial memudahkan politikus menjangkau lebih banyak masyarakat dengan cepat. Melihat keberhasilan kampanye dengan menggunakan media sosial pada Pemilu 2024, strategi komunikasi politik ini mungkin akan kembali digunakan di pemilu berikutnya. Meskipun begitu, gaya kampanye tradisional yang lebih nyata dan dekat dengan masyarakat juga masih terbukti efektif menggaet massa sehingga strategi ini mungkin juga akan diterapkan di pemilu berikutnya.[8]

Sebagai usulan penelitian terkait partisipasi politik generasi milenial, penulis memilih Kelurahan Petukangan Utara, sebagai locus untuk diteliti. Kelurahan Petukangan Utara terletak di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang menjadi bagian dari wilayah administratif Jakarta yang lebih besar. Petukangan Utara dikenal dengan perpaduan antara area pemukiman, komersial, dan industri, dengan komunitas yang terus berkembang dan beragam layanan lokal. Kelurahan petukangan utara,

[8] LM Psikologi UGM, "Partisipasi Anak Muda Dalam Pemilu 2024: Kajian Psikologis Mengenai Kesadaran Politik Pemuda Indonesia," 2024

kecamatan pesanggrahan, Jakarta Selatan, merupakan salah satu wilayah urban yang mengalami pertumbuhan penduduk muda cukup pesat. Dinamika sosial dan politik di wilayah ini menjadi representasi menarik untuk mengkaji partisipasi politik generasi milenial dalam konteks lokal. Selain itu, keberagaman latar belakang sosial, pendidikan, serta akses terhadap informasi di wilayah ini memberikan warna tersendiri terhadap pola partisipasi politik masyarakatnya. Petukangan Utara terletak di bagian selatan Jakarta, dan berbatasan dengan area lain seperti Pesanggrahan, Petukangan Selatan, dan distrik lain di Jakarta Selatan. Area ini memiliki akses ke jalan utama dan rute transportasi yang menghubungkan ke bagian lain Jakarta, menjadikannya area yang terhubung dengan baik bagi penduduk dan bisnis. Petukangan Utara dilengkapi dengan infrastruktur lokal, termasuk sekolah, pasar, pusat kesehatan, dan tempat rekreasi. Populasi yang beragam, dengan campuran penduduk kelas menengah ke bawah. Ada juga bisnis lokal dan pedagang kaki lima yang melayani masyarakat. Kelurahan ini merupakan salah satu kawasan berkembang di Jakarta, yang diuntungkan oleh pembangunan perkotaan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai fenomena politik uang (*money politics*) dan respon partisipasi politik generasi milenial, khususnya dalam konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, penulis mengajukan usulan penelitian yang berjudul **"*Money politics* Dan Respon Generasi Milenial (Studi Kasus: Fenomena Pilpres Tahun 2024 Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan)".**

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Money politics Dan Respon Generasi Milenial, Studi Kasus Fenomena Pilpres Tahun 2024 Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

1.2.2. Subfokus Penelitian

Untuk menguraikan fokus utama penelitian, penulis menetapkan subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Subfokus ini berfokus pada tingkat dan cara partisipasi politik dari generasi milenial. Meneliti seberapa besar keterlibatan mereka dalam pemilu, apakah mereka memilih untuk berpartisipasi (misalnya dengan mencoblos) atau justru memilih untuk tidak berpartisipasi, dan mengapa mereka membuat keputusan tersebut.
2. Bentuk-bentuk dan pola *Money politics* yang terjadi dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Subfokus ini akan mengidentifikasi berbagai macam bentuk praktik *Money politics* yang terjadi di lapangan, serta pola-pola penyalurannya di kalangan pemilih milenial.
3. Fenomena *Money politics* dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Subfokus ini bertujuan untuk

mengkaji secara mendalam bagaimana fenomena politik uang itu sendiri terjadi dan bagaimana pemilih milenial meresponnya.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk dan pola praktik *Money politics* dikalangan generasi milineal yang terjadi selama masa Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan?
3. Bagaimana *Money politics* mempengaruhi respon dan keputusan politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
2. Menganalisis bentuk praktik *Money politics* dikalangan generasi milineal yang terjadi di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada Pilpres Tahun 2024

3. Menganalisis Respon dan keputusan politik generasi milenial di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan adanya fenomena *Money politics* pada Pilpres Tahun 2024

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang ilmu politik, khususnya terkait kajian mengenai praktik politik uang (money politics) dan respon pemilih generasi milenial dalam konteks demokrasi elektoral di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu serta lembaga pengawas (seperti KPU dan Bawaslu) mengenai pola dampak *Money politics* terhadap partisipasi politik Masyarakat di Indonesia khususnya generasi milenial.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Nyarwi. 2011. *Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aspinall, Edward dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Kampung KB Petukangan Utara." Diakses 1 November 2025. https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/2892/kampung-kb-petukangan-utara.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

———. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

———. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. IX. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Dahl, Robert A. *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

———. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.

Dahl, Robert A, and Sahat (Translator) Simamora. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi Dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Dimock, Michael. “Defining Generations: Where Millennials End and Generation Z Begins.” *Pew Research Center*, 2019. https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/.

Downs, Anthony. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Brothers, 1957.

Fitriana. "Kerentanan Pemilih Miskin terhadap Politik Uang dalam Pemilu Legislatif." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 8, no. 1 (2020): 40-55.

Haris, Syamsuddin. *Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. PPW-LIPI, 1997.

Held, David. *Models of Democracy*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007.

Huntington, Samuel P, and Joan M Nelson. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press, 1976.

Ismawan, Indra. *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

Juliansyah, Elvi. 2007. *Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi V. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "Data Jumlah DPT Pilkada 2024 Berdasarkan Usia: Gen Z-Boomer." *detikNews*. 21 November 2024. Diakses 1 November 2025. https://news.detik.com/pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "KPU: Partisipasi Pemilih Pilpres 2024 81,78 Persen." *KOMPAS.com*. 5 Juni 2024. Diakses 1 November 2025. https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/13452691/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-2024-8178-persen.

Kristiadi, Joseph. “Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih Di Indonesia: Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih Di Kotamadya Yogyakarta Dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 1987-1992.” Universitas Gajah Mada, 1994.

Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2006.

Lubis, Bertha. *Keterkaitan Bonus Demografi Dengan Teori Generasi*. *Registratie*. Vol. 1, 2019.

Mahendra, A A Oka. *Pemilu Pilkada 2005: Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal*. Jakarta: Milenium Publisher, 2005.

Machiavelli, N. (1998). *The Prince* (H. C. Mansfield, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1532)

Mannheim, Karl. "The Problem of Generations." Dalam *Essays on the Sociology of Knowledge*, 276-322. New York: Routledge & Kegan Paul, 1952.

Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Edited by 2nd. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994.

Muhtadi, Burhanuddin. 2013. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Nusantara, Tim Pandom Media. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.

"Partisipasi Anak Muda Dalam Pemilu 2024: Kajian Psikologis Mengenai Kesadaran Politik Pemuda Indonesia." LM Psikologi UGM, 2024.

Pew Research Center, "Generations Defined," diakses 20 april 2025, https://www.pewresearch.org/topic/generations-and-age/.

Prasojo, Eko. *Dinamika Politik Lokal: Patronase dan Broker Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan, "Wilayah Kerja," diakses 1 November 2025, https://pkcpesanggrahan.jakarta.go.id/flags/berita/profil/wilayah-kerja.

Puspitasari, Sri H. 2004. "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu." *Ius Quia Iustum Law Journal* 11 (25): 135–148.

Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta.

Rose-Ackerman, Susan. 1999. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.

Simon, Herbert A. 1957. *Models of Man: Social and Rational*. New York: John Wiley & Sons.

Statistik, Badan Pusat. "Hasil Sensus Penduduk 2020: Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Generasi." *Badan Pusat Statistik*, 2021.

https://demakkab.bps.go.id/id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html.

Strauss, William, and Neil Howe. *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. New York: William Morrow and Company, 1991.

Subekti, Tia. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)," 2014. https://www.neliti.com/publications/108550/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-umum-studi-turn-of-voter-dalam-pe.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Tazkia, Institut. "Mengulik Istilah Generasi Millenial." *Institut Tazkia*, 2021. https://tazkia.ac.id/berita/populer/442-mengulik-istilah-generasi-millenial.

———. "Mengulik Istilah Generasi Millennial." *Tazkia.Ac.Id*, 2020. https://tazkia.ac.id/berita/populer/442-mengulik-istilah-generasi-millenial.

Tapsell, Ross. 2017. *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. London: Rowman & Littlefield.

Topatimasang, Roem. *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*. Jakarta: Maarif Institute, 2011.

Umam, Ahmad Khoirul. *Kiai & Budaya Korupsi Di Indonesia*. Semarang: Rasail, 2006.

Verba, Sidney, dan Norman H. Nie. 1972. *Participation in America: Political Equality and the People*. New York: Harper & Row.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretative sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.; E. Fischoff et al., Trans.). University of California Press. (Original work published 1922)